

**Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar
(Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia)**

Ahmad

Universitas Gajayana
ahmad_t@unigamalang.ac.id

Abstract

Penelitian dengan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Melalui Pemberian Kartu Indonesia Pintar di Indonesia. Penelitian survei selama 1 (satu tahun) terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai Maret 2016. Teknik pengambilan sampel berdasarkan koridor wilayah dengan memperhatikan derajat keseragaman (*degree of homogeneity*). Proses pengumpulan data primer dan data sekunder dengan analisis dokumen, penyebaran kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (1994:10), dengan melakukan tiga tahapan analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Sosialisasi Program Indonesia Pintar melalui pemberian kartu Indonesia pintar telah dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan berjenjang. (2) Pendataan peserta penerima bantuan Program Indonesia Pintar telah terintegrasi dengan sistem layanan DAPODIK Kemdikbud, Kemensos, BPS, Bappeda, PDSP, dan TNP2K dan perangkat desa. (3) Penyaluran dana PIP setiap tahun mengalami keterlambatan. (4) Koordinasi pelaksanaan PIP oleh dinas pendidikan masih kurang optimal dengan jajaran kementerian sosial, sekolah, lembaga penyalur, RT/RW. (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP secara intensif telah dilakukan minimal 1 kali. (6) Program Indonesia Pintar berdampak peningkatan Angka Partisipasi Sekolah maupun Indeks Pembangunan manusia Indonesia setiap tahun terus meningkat. (7) Pengelola Program Indonesia Pintar secara aktif memberikan layanan yang cepat, dan terpercaya, termasuk pengaduan melalui email dan SMS.

Kata kunci: kinerja, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar

PENDAHULUAN

Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla diantaranya adalah “Membangun Indonesia dari Pinggiran, Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”. Wujud nawacita tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 untuk menyediakan Kartu Indonesia Pintar dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima masyarakat usia sekolah 7-21 tahun.

Instruksi tersebut mencoba untuk mengurangi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan nasional yang dihadapi dewasa ini seperti: 1) Masih banyak satuan pendidikan formal yang proses pembelajarannya kurang ditunjang dengan ketersediaan kurikulum yang memadai dan proses pembelajaran yang menyenangkan; 2) Masih banyak satuan pendidikan formal yang proses pembelajarannya belum ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, 3) Masih banyak anggapan masyarakat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya di tangan masyarakat, 4) Masih banyak satuan pendidikan formal yang kurang membangun kekuatan jaringan dengan *stakeholders* eksternal, 5) Dengan alasan kondisi geografis dan ekonomi orang tua sehingga masih banyak usia produktif yang belum mendapatkan layanan pendidikan, 6) Masih banyak pendidik pada satuan

pendidikan formal yang tidak memiliki relevansi dan kompetensi dengan mata pelajaran sebagai tugas yang diampunya, 7) Masih banyak pendidik dan masyarakat yang menilai keberhasilan peserta didik ditinjau sebatas pengukuran angka yang seharusnya pula adalah penanaman nilai-nilai etika dan estetika, 8) Masih banyak satuan pendidikan formal yang dalam proses penyelenggaraan pendidikannya kurang memahami pendekatan manajemen baik strategik maupun sistem sehingga berdampak pada stagnasi dan rendahnya mutu, dan 9) Masih banyak permasalahan pendidikan formal lain yang berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah usia 6-21 tahun.

Kualitas sumber daya manusia adalah indikator utama keberhasilan pembangunan bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama *Milenium Development Goals* (MDG) dan juga sasaran utama RPJPN 2005-2025. Peningkatan mutu pendidikan merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan, pemberian prioritas kepada pembangunan masyarakat yang dilakukan suatu bangsa menunjukkan bahwa visi pembangunan suatu bangsa sudah memiliki arah pendidikan yang jelas.

Pada tahun 2014, tercatat 75,7 persen angka putus sekolah disebabkan oleh masalah ekonomi baik karena tidak memiliki biaya sebesar 67,0 persen maupun karena anak harus bekerja sebesar 8,7 persen disamping itu juga mahalnyanya total biaya pendidikan mengakibatkan akses masyarakat kurang mampu agar bersekolah semakin kecil. Hal ini akan berakibat pada siklus alur kemiskinan terus berlanjut, dan negara berpotensi kehilangan arah bagi kader-kader penerus terbaiknya. Untuk mengatasi permasalahan bangsa tersebut, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan untuk kalangan keluarga kurang mampu melalui program jaring pengaman sosial (JPS) bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan secara besar-besaran kepada masyarakat dari keluarga miskin dengan instrumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam menjalankan PIP, Pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan antara lain: Pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, secara implisit dijelaskan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu; Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima Program Indonesia Sehat. Ketiga program di atas ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya pada tahun 2015 ditargetkan penerima bantuan PIP mencapai 100 persen dengan alokasi anggaran yang bagi siswa penerima manfaat dari program Indonesia pintar ini Rp 12,8 triliun, atau naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 6,6 triliun.

Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan; Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA), bahkan anak – anak diluar sekolah; yang berasal dari keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian penyelenggara program, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang digagas Presiden Joko Widodo. Di lapangan sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar Program Indonesia Pintar ini berjalan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan Pemerintah serta perwakilan dari kabupaten/kota adalah untuk mengetahui kendala, saran serta masukan terkait implementasi Program Indonesia Pintar sangat diharapkan. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan DPR RI dapat mengalokasikan dana bagi PIP sebesar Rp 11 triliun untuk sasaran 17,9 juta siswa di seluruh Indonesia. Tahap pertama, akan disalurkan sebanyak 4.945.650 siswa. Hal yang terpenting bukanlah semata tentang siswa tetapi juga terkait dengan tunjangan guru, sertifikasi guru dan tunjangan guru honorer. Sasaran program Indonesia Pintar lainnya adalah siswa penerima bantuan bukan hanya mereka yang berada di dalam sekolah tetapi juga yang berada di luar sekolah.

Karena begitu luasnya cakupan program Indonesia pintar, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program Indonesia pintar, baik dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaat program yang dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sehingga dilakukan suatu kajian dengan tema kajian Peningkatan Kinerja Program Pemberian Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Melalui Pemberian Kartu Indonesia Pintar di Indonesia. Kajian ini kedepan diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian survei ini dilakukan selama 1 (satu tahun) terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai Maret 2016 yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yakni Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan; dan Tahap Pembuatan Laporan. Teknik pengambilan sampel berdasarkan koridor wilayah dengan memperhatikan derajat keseragaman (*degree of homogeneity*) dari populasi yang berada di provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku yang mewakili populasi Indonesia. Dari 6 provinsi tersebut diambil 30 sampel penelitian yang berasal dari unsur Dinas Pendidikan, Pengelola Sekolah, Peserta Didik, dan Lembaga Penyalur. Singaribun dan Effendi berpendapat bahwa “makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang diambil” (1989: 150). Proses pengumpulan data primer dan data sekunder dengan analisis dokumen, penyebaran kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan pendekatan yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (1994:10), dengan melakukan tiga tahapan analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

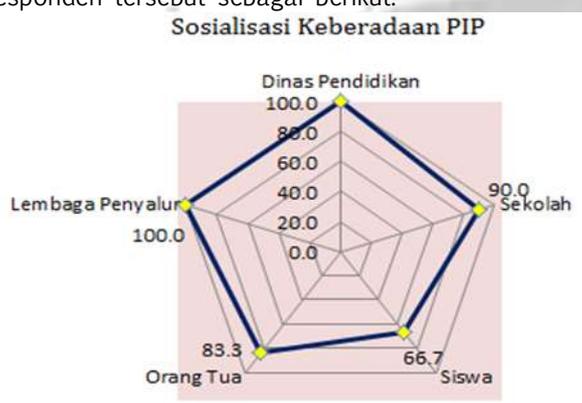
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Program

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta mendorong keberlanjutan pendidikan, pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan melalui Program Indonesia Pintar. Dengan cakupan yang lebih luas, Pemerintah berusaha menjangkau anak putus sekolah dari keluarga kurang mampu agar mau kembali melanjutkan pendidikannya. Upaya memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tim pengembang melakukan sosialisasi keberadaan program.

Proses sosialisasi keberadaan PIP dilakukan dengan pendekatan berjenjang maksudnya dilakukan mulai dari tingkat pusat, ke daerah, sampai kepada pengelola Program Indonesia Pintar yang berada di tingkat satuan pendidikan. Pemerintah pusat melakukan sosialisasi PIP dengan menghadirkan perwakilan dari pemerintah daerah yang dilakukan dalam bentuk workshop tingkat nasional, kemudian hasil dari kegiatan tersebut pemerintah daerah meneruskan informasi sampai ke tingkat sekolah, lalu tingkat sekolah memberikan informasi kepada peserta didik dan masyarakat.

Berdasarkan tanggapan dari responden kajian, proses sosialisasi keberadaan program Indonesia Pintar melalui Pemberian Kartu Indonesia Pintar telah dilaksanakan dengan baik. Tanggapan oleh dinas pendidikan, dan lembaga penyalur dana PIP memberikan tanggapan 100 persen menyatakan telah disosialisasikan, sedangkan pihak sekolah 90 persen, orang tua siswa memberikan tanggapan sebesar 83,3 persen dan siswa sebesar 66,7 persen. Tanggapan yang berbeda dari orang tua siswa dan siswa tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaan sosialisasi keberadaan PIP tidak selamanya dilibatkan karena pelibatan orang tua dan siswa dalam kegiatan sosialisasi diterapkan dengan sistem perwakilan sehingga terkadang responden yang mengisi kuesioner tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi, selain dari responden tersendiri berhalangan hadir dalam proses pelaksanaan sosialisasi PIP. Adapun besaran tanggapan responden tersebut sebagai berikut.



Sumber: Hasil Analisis Data Kajian, 2015
 Gambar 1. Sosialisasi Keberadaan PIP

Banyak ragam bentuk sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan cara dan kebutuhan. Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan ditemukan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan secara intensif kepada *stakeholder* dengan bentuk penyebaran surat dari direktorat teknis, rapat koordinasi, dan penyebaran petunjuk teknis baik melalui pertemuan-pertemuan, dan media sosialisasi. Sosialisasi pula dilakukan pada pihak terkait dengan kerjasama yang intensif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hasil kajian tersebut, mempertegas pernyataan bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Februari 2015 bahwa 83 persen Kepala Sekolah dan pengelola sekolah sudah mendapatkan sosialisasi Program Indonesia Pintar (JPPN.com, 2005). Agenda penting yang dibicarakan dalam kegiatan sosialisasi adalah membahas mekanisme pendataan penerima PIP yang berasal dari rumah tangga tidak mampu, koordinasi antar lembaga daerah, dan dukungan legal terhadap program. Adapun hasil pengumpulan data lapangan tentang proses dan sasaran kegiatan sosialisasi keberadaan Program Indonesia Pintar sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisa Data Kajian, 2015.
 Gambar 2. Unsur yang terlibat dalam Sosialisasi Program PIP

Berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, secara empiris dinyatakan bahwa proses sosialisasi tentang program Indonesia Pintar sangat intensif dilakukan oleh tim sosialisasi dari pemerintah pusat sampai ke satuan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka keterlibatan pihak sekolah (100%), tokoh masyarakat (83,33%) dan lembaga penyalur (66,67%) dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu pula, terdapat 79,17% Kepala Sekolah

mengikuti kegiatan sosialisasi lebih dari sekali.

Besaran ini menunjukkan bahwa pemahaman pihak sekolah terhadap Program Indonesia Pintar sudah baik. Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi PIP adalah berkaitan langsung dengan regulasi pemerintah, yakni Pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua peraturan ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 November 2014.

Berdasarkan temuan kajian, maka pelaksanaan sosialisasi Program Indonesia Pintar melalui Pemberian Kartu Indonesia Pintar dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Ada beberapa kepala sekolah belum mengetahui adanya PIP melalui pemberian KIP karena kurangnya sosialisasi dan terlambatnya info PIP.
2. Unsur yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi adalah Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Lembaga Penyalur, Orangtua siswa penerima, Orangtua calon penerima Bantuan dan siswa penerima/calon penerima bantuan.
3. Media sosialisasi PIP meliputi surat edaran, rapat koordinasi, media cetak dan media elektronik.
4. Sosialisasi masih sangat terbatas baik yang dilakukan dinas pendidikan kota sehingga informasi yang diterima sekolah tidak lengkap (Frekuensi sosialisasi PIP yang dilakukan oleh dinas pendidikan kota dirasakan masih kurang, karena hanya berlangsung satu kali dalam setahun).

Pendataan

Untuk menjangkau penerima bantuan PIP melalui pemberian KIP proses pendataan calon penerima program dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat yang merujuk pada data yang bersumber dari Kemensos, Badan Pusat Statistik, Bappeda, Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikbud, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan perangkat Desa. Mekanisme pendataan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran dari sekolah. Akan tetapi, ditemukan pula proses pendataan dilakukan oleh pihak kelurahan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran dari pemerintah desa/Kelurahan. Akan tetapi mekanisme ini dipandang menjadi kendala bagi sekolah dalam penetapan sasaran program. Asumsi pun bermunculan bahwa dengan tidak melibatkan pihak sekolah dalam pendataan maka dikhawatirkan program tidak memenuhi sasaran anak kurang mampu/miskin.



Gambar 3. Persentase Pendataan Program PIP melalui Pemberian KIP

Berdasarkan gambar di samping, terdapat 85% pihak sekolah telah membentuk tim pengelola dana PIP melalui surat ketetapan kepala sekolah tujuannya adalah supaya sekolah lebih konsen dalam pemetaan peserta didik penerima bantuan dana PIP. Akan tetapi, dalam perjalanannya, pihak sekolah mengalami kesulitan di dalam memberikan honorarium kepada tim pelaksana, sehingga langkah yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari BOS dan Komite Sekolah untuk menutupi honorarium pengelola dana

bantuan KIP yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali.

Tim manajemen yang telah terbentuk melakukan pendataan bagi penerima bantuan KIP dengan sasaran pendataannya antara lain; Penerima BSM tahun 2014 dari KPS, siswa pemegang KPS namun belum mendapat bantuan BSM, siswa peserta PKH non KPS, siswa dari panti sosial, siswa yatim dan/atau piatu, dan siswa miskin usulan sekolah/pemangku kepentingan. Sedangkan sasaran siswa antisipasi korban bencana dan anak usia sekolah (6 – 21 tahun per 2015) tidak bersekolah yang diharapkan bersekolah belum masuk dalam sasaran pendataan penerima bantuan pendidikan melalui pemberian KIP. Sumber data yang menjadi acuan dalam pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan pendidikan adalah bersumber dari basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kementerian sosial berdasarkan usulan kelurahan.

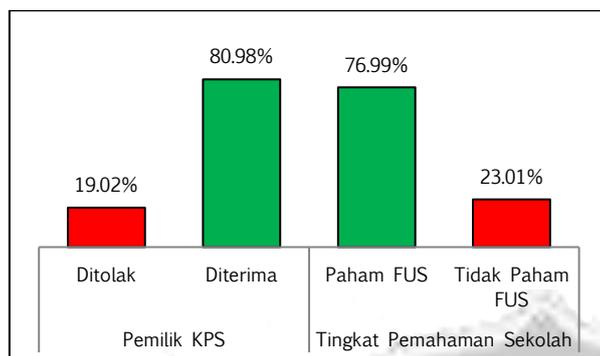
Setelah dilakukan pendataan, tim berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk menetapkan jumlah peserta yang diajukan untuk mendapat bantuan dana KIP. Berdasarkan hasil lapangan dalam penetapan penerima bantuan dilakukan oleh dinas pendidikan sebesar 96,3 persen, oleh pihak sekolah sebesar 89,6 persen, Komite Sekolah sebesar 12,5 persen, dan pihak kelurahan 27,1 persen. Temuan ini mempertegas bahwa dinas pendidikan dan sekolah memiliki otoritas yang cukup tinggi di dalam penetapan calon penerima bantuan dana KIP, walaupun pada sebagian daerah masih ditemukan pihak kelurahan yang melakukan pendataan terhadap calon penerima bantuan KIP.

Dinas Pendidikan membentuk tim verifikasi Sosialisasi Aplikasi Dapodik tujuannya melakukan pendampingan pemuktahiran data Dapodik, dan melakukan *crosscheck* data Dapodik. Dalam pelaksanaannya, karena pihak sekolah dan dinas pendidikan di daerah tidak melakukan pemuktahiran data maka ditemukan bahwa penerima bantuan siswa miskin pada tahun sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan Program Indonesia Pintar.

Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat 19,02 persen siswa yang memiliki KPS belum terakomodir menjadi penerima bantuan PIP, sedangkan sisanya 80,98 persen telah menerima bantuan dana PIP. Penyebabnya karena masih ditemukan pihak sekolah dan dinas pendidikan di daerah yang tidak melakukan pemuktahiran data sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Disisi lain, ditemukan juga siswa yang tidak memiliki KPS malah mendapatkan bantuan PIP. Langkah yang harusnya ditempuh oleh sekolah adalah mengisi format usulan sekolah bagi anak-anak pemilik KPS namun belum terakomodir dalam bantuan dana PIP. Akan tetapi ditemukan bahwa terdapat 43,01 persen sekolah tidak mengetahui tentang mekanisme pengusulan nama peserta KPS yang tidak terakomodir melalui Format Usulan Sekolah (FUS).

Berdasarkan data lapangan terdapat 23,01 persen sekolah belum mengetahui tentang format usulan sekolah (FUS) untuk mengakomodir anak-anak yang menjadi sasaran program untuk diajukan kembali supaya menerima bantuan dana program Indonesia Pintar. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan konsolidasi baik dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan sosialisasi yang masih kurang ditambah lagi keterbatasan sumber daya manusia yang ada menjadi permasalahan tersendiri.

Diakui secara bahwa sosialisasi dengan menerbitkan surat edaran yang bersifat arahan ke dinas pendidikan masih dipandang belum tepat, karena surat edaran yang telah diterbitkan tidak langsung disampaikan ke satuan pendidikan secara merata. Apalagi melihat struktur geografis Indonesia yang cukup dinamis sehingga daerah yang sulit akses informasi dan transportasi sulit mengikuti perkembangan arah dan haluan program pendidikan.



Sumber: Hasil Analisa Lapangan, 2015
Gambar 4. Penerima PIP dan Pemahaman Sekolah tentang Format Usulan Sekolah (FUS) untuk Pemilik KPS yang Belum mendapat Bantuan Dana KIP

Upaya yang dilakukan kedepan untuk memperbaiki pendataan dalam rangka implementasi Program Indonesia Pintar Tahun 2015, melalui surat edaran Direktur masing-masing direktorat secara langsung diinstruksikan kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SDLB, SMPLB dan SLB agar segera melakukan pemutakhiran data siswa penerima BSM yang memiliki kartu KPS. Diwajibkan mengisi nomor KPS (Sesuai Tertera di Kartu KPS/ bukan nomor lain) di aplikasi DAPODIKDas pada tabel peserta didik bagi yang memiliki. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar no: 5086/C/MI/2014 tentang Pemanfaatan data Dapodik untuk BSM/KIP. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota seluruh Indonesia tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2015 Program BSM akan dilanjutkan dengan program Indonesia Pintar (PIP) yang diberlakukan secara nasional dan mekanisme seleksi siswa penerima PIP akan dilakukan melalui Dapodik.

Untuk itu diinstruksikan kepada pihak sekolah agar mendata dan mengisi data siswa dari orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan formulir yang tersedia. Hasil kajian terhadap pelaksanaan program Indonesia Pintar melalui pemberian kartu Indonesia pintar dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Proses pendataan calon penerima program KIP dilakukan oleh sekolah satu tahun sekali dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Sekolah membuat berita acara surat keputusan serta rekapitulasi data siswa calon penerima KIP dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penyalur.
2. Sasaran penerima bantuan KIP berdasarkan kriteria berikut; Penerima BSM tahun 2014 dari KPS, siswa pemegang KPS namun belum mendapat bantuan BSM, siswa peserta PKH non KPS, siswa dari panti sosial, siswa yatim dan/atau piatu, dan siswa miskin usulan sekolah/pemangku kepentingan. Sedangkan sasaran siswa antisipasi korban bencana dan anak usia sekolah (6 – 21 tahun per 2015) tidak bersekolah yang diharapkan bersekolah belum masuk dalam sasaran pendataan penerima bantuan pendidikan melalui pemberian KIP.
3. Sumber data yang menjadi acuan penerima KIP adalah Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistika, Badan Perencanaan Daerah, Pusat Data dan Statistika Keementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Perangkat Desa.

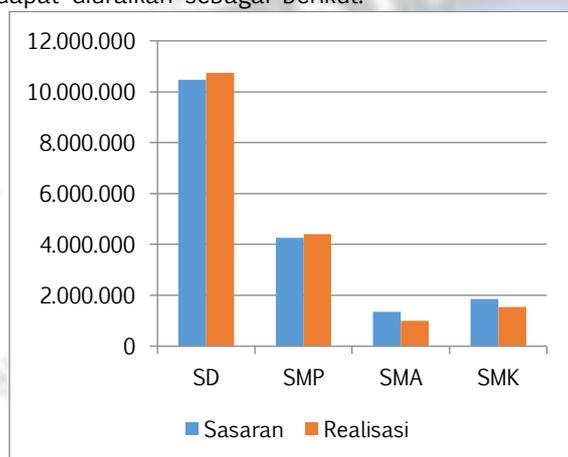
Berdasarkan hasil temua lapangan, terdapat beberapa hasil temuan yang menjadi kendala dalam proses pendataan calon penerima KIP, antara lain:

1. Terdapat perbedaan data siswa yang berhak menerima KIP antara sekolah dengan dinas sosial setempat.
2. Terdapat beberapa data siswa yang tidak valid sehingga siswa yang berhak mendapatkan KIP tidak dapat menerima bantuan tersebut.
3. Lembaga penyalur tidak memiliki staf yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi sehingga lembaga penyalur tidak mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi saat penyaluran dana KIP.

4. Terdapat beberapa data siswa yang tidak valid dan tidak ada waktu untuk perbaikan berkas (berkas susulan).
5. Ada salah satu kasus di Dinas Pendidikan, pendataan siswa calon penerima KIP dilakukan oleh pihak kelurahan bukan dari sekolah atau Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan tidak mengetahui apabila terjadi kesalahan data siswa.

Mekanisme Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah program jangka panjang, yang tentu saja mempunyai nilai strategis bagi pihak penyalur dan pihak pemerintah, apalagi PIP adalah program yang di tujukan bagi proses pendidikan anak bangsa. Keberhasilan pengelolaan program ini, dipengaruhi pula keseriusan lembaga penyalur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data terakhir per tanggal 19 Desember 2015, jumlah peserta didik penerima program Indonesia Pintar melalui pemberian kartu Indonesia Pintar berdasarkan Jenjang Pendidikan, Provinsi, dan Kota Kajian dapat diuraikan sebagai berikut.

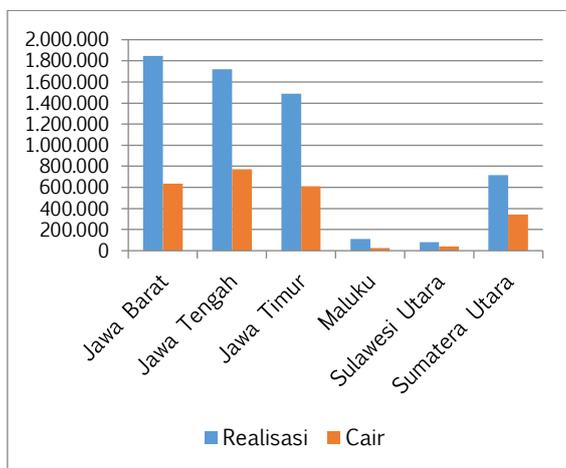


Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015

Gambar 5. Perkembangan Jumlah Penerima KIP berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah sasaran penerima KIP adalah 17.920.270 yang terdiri dari 10,470,610 siswa SD, 4,249,607 siswa SMP, 1,353,515 siswa SMA, dan 1,846,538 siswa SMK. Untuk tingkat SD dari 10,470,610 sasaran penerima KIP, yang telah direalisasikan sebanyak 10,743,015, ini berarti terdapat peningkatan jumlah penerima KIP sebanyak 272,405. Sama seperti SD, untuk tingkat SMP juga mengalami kenaikan jumlah peminat, dari 4,249,607 sasaran, tapi realisasi di lapangan sebanyak 4,399,430 meningkat 149,823 penerima KIP.

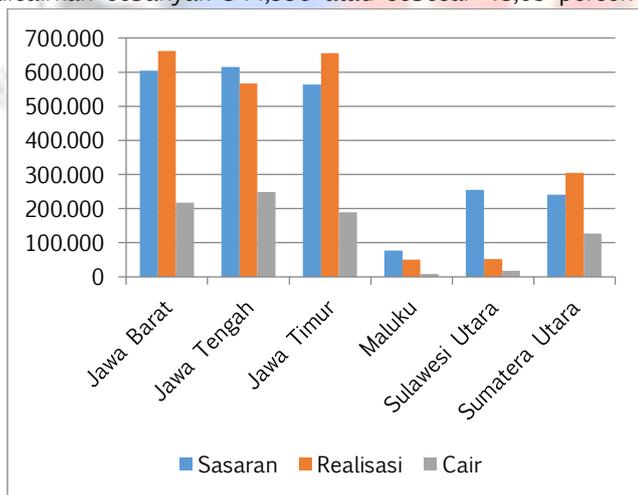
Sementara itu, untuk tingkat SMA dari 1,353,515 yang telah direalisasikan sebanyak 1,003,234. Sedangkan untuk tingkat SMK dari 1,846,538 dan yang telah direalisasikan sebanyak 1,538,522. Hal ini berarti bahwa perkembangan jumlah peminat KIP sudah cukup baik.



Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SD Berdasarkan Provinsi Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Barat dari 1,844,702 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 635,650 atau sebesar 34,46 persen dari jumlah penerima. Untuk Provinsi Jawa Tengah dari 1,720,885 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 770,960 atau sebesar 44,80 persen dari jumlah penerima. Sementara itu, untuk provinsi Jawa Timur dari 1,488,687 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 613,029 atau sebesar 41,18 persen dari jumlah penerima. Jauh di bawah provinsi sebelumnya, untuk Provinsi Maluku dari 113,457 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 27,703 atau sebesar 24,42 persen dari jumlah penerima.

Sama halnya dengan Provinsi Maluku, untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 78,329 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 40,269 atau sebesar 51,41 persen dari jumlah penerima. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara dari 717,944 penerima KIP, yang telah dicairkan sebanyak 344,996 atau sebesar 48,05 persen dari jumlah penerima.

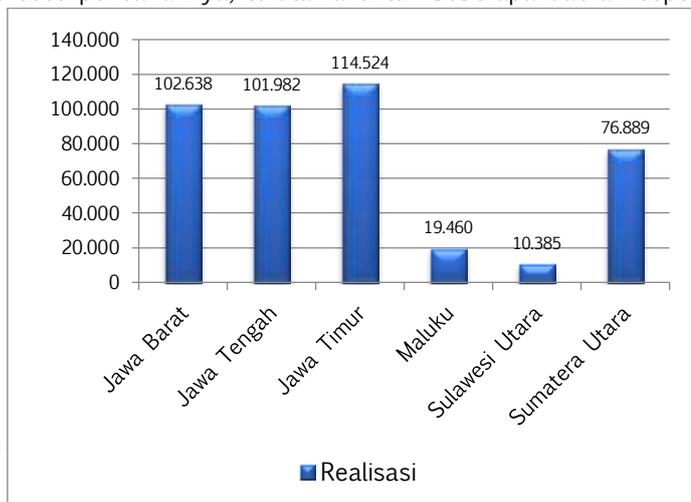


Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 7. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SMP Berdasarkan Wilayah Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Barat jumlah penerima KIP sebanyak 661,923 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 604,406 dan sebanyak 217,418 yang telah dicairkan atau sebesar 32,85 persen dari jumlah penerima. Untuk Provinsi Jawa Tengah dari 614,777 sasaran penerima KIP, yang direalisasi sebanyak 566,615, dan sebanyak 248,555 yang telah dicairkan atau sebesar 43,87 persen dari jumlah penerima.

Sementara itu, untuk provinsi Jawa Timur jumlah penerima KIP sebanyak 655,658 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 563,255 dan yang telah dicairkan sebanyak 189,481 atau sebesar 28,90 persen dari jumlah penerima. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku dari 77,251 sasaran penerima KIP, yang telah direalisasikan sebanyak 50,557, dan dicairkan sebanyak 8,141 atau sebesar 16,10 persen dari jumlah penerima. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Utara dari 254,411 sasaran penerima KIP, yang telah direalisasikan baru sebanyak 51,431, dan

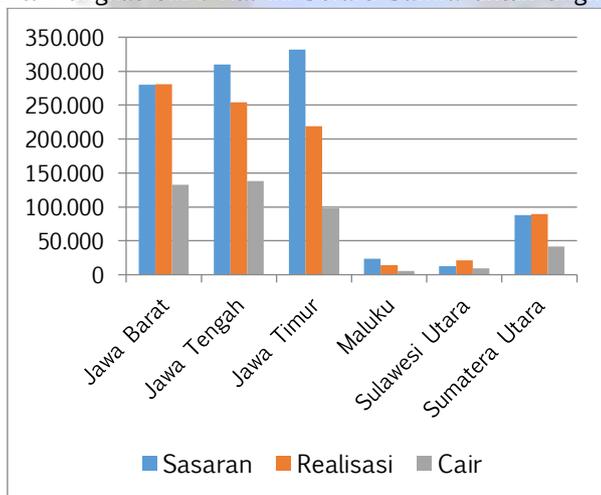
dicairkan sebanyak 18,579 atau sebesar 36,12 persen dari jumlah penerima. Sama halnya dengan Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara jumlah penerima KIP sebanyak 304,773 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 241,349 dan sebanyak 126,810 yang telah dicairkan atau sebesar 41,61 persen dari jumlah penerima. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan untuk tingkat SMP penyaluran bantuan KIP cukup baik, namun perlu dioptimalkan lagi dalam proses pencairannya, terutama untuk beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi Utara.



Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 8. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SMA Berdasarkan Wilayah Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Barat jumlah penerima KIP sebanyak 102,638 atau sebesar 10,23 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA. Untuk Provinsi Jawa Tengah jumlah penerima KIP sebanyak 101,982 atau sebesar 10,17 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA. Sementara itu, untuk provinsi Jawa Timur jumlah penerima KIP sebanyak 114,524 atau sebesar 11,42 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA.

Begitu juga untuk Provinsi Maluku jumlah penerima KIP sebanyak 19,460 atau sebesar 1,94 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA. Dan untuk Provinsi Sulawesi Utara jumlah penerima KIP sebanyak 10,385 atau sebesar 1,04 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara jumlah penerima KIP sebanyak 76,889 atau sebesar 7,66 persen dari jumlah penerima secara nasional untuk tingkat SMA. Hal ini berarti bahwa untuk tingkat SMA lebih dioptimalkan lagi.

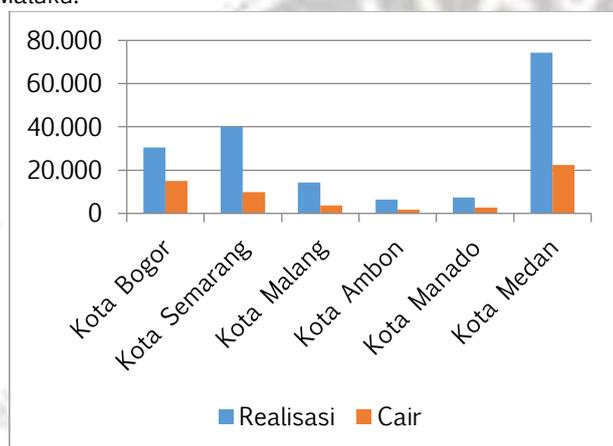


Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SMK Berdasarkan Wilayah Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Barat jumlah penerima KIP sebanyak 281,202 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 280,369 dan sebanyak 132,724 yang telah dicairkan atau sebesar 47,20 persen dari jumlah penerima. Untuk Provinsi Jawa Tengah dari 310,185 sasaran penerima KIP, yang direalisasi sebanyak 254,128, dan sebanyak 138,324 yang telah dicairkan atau sebesar 54,43 persen dari jumlah penerima. Sementara itu, untuk provinsi Jawa Timur dari 331,651 sasaran penerima KIP, yang direalisasi sebanyak 218,947, dan sebanyak 97,887 yang telah dicairkan

atau sebesar 44,71 persen dari jumlah penerima.

Demikian juga untuk Provinsi Maluku dari 23,163 sasaran penerima KIP, yang telah direalisasikan sebanyak 14,269, dan dicairkan sebanyak 5,434 atau sebesar 38,08 persen dari jumlah penerima. Untuk Provinsi Sulawesi Utara jumlah penerima KIP sebanyak 20,979 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 12,945 dan sebanyak 9,298 yang telah dicairkan atau sebesar 44,32 persen dari jumlah penerima. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara jumlah penerima KIP sebanyak 89,699 lebih banyak dari sasaran penerima sebanyak 87,852 dan sebanyak 41,295 yang telah dicairkan atau sebesar 46,04 persen dari jumlah penerima. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan untuk tingkat SMK penyaluran bantuan KIP cukup baik, namun perlu dioptimalkan lagi dalam proses pencairannya, terutama untuk beberapa daerah seperti Maluku.



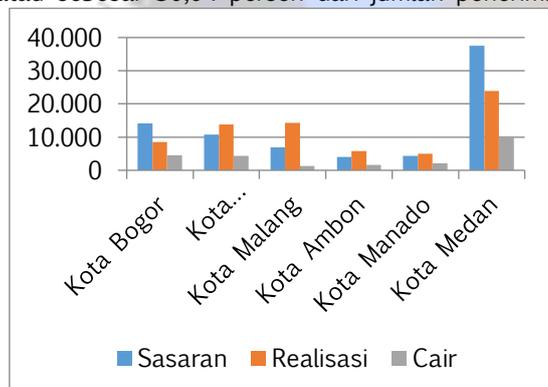
Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Kota Bogor, dari 30,629 penerima KIP sebanyak 15,075 yang sudah dicairkan atau sebesar 49,22 persen dari jumlah penerima. Kota Semarang sendiri dari 40,141 penerima KIP sebanyak 9,892 yang sudah dicairkan atau sebesar 24,62 persen dari jumlah penerima. Begitu juga untuk Kota Malang dari 14,362 penerima KIP sebanyak 3,717 yang sudah dicairkan atau sebesar 25,87 persen dari jumlah penerima. Sementara itu, untuk Kota Ambon dari 6,511 penerima KIP sebanyak 1,744 yang sudah dicairkan atau

Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015

Gambar 10. Perkembangan Jumlah Penerima KIP

Jenjang SD Berdasarkan Kota Kajian

sebesar 26,79 persen dari jumlah penerima. Dan untuk Kota Manado dari 7,467 penerima KIP sebanyak 2,814 yang sudah dicairkan atau sebesar 37,69 persen dari jumlah penerima. Sedangkan untuk Kota Medan dari 74,234 penerima KIP sebanyak 22,300 yang sudah dicairkan atau sebesar 30,04 persen dari jumlah penerima.

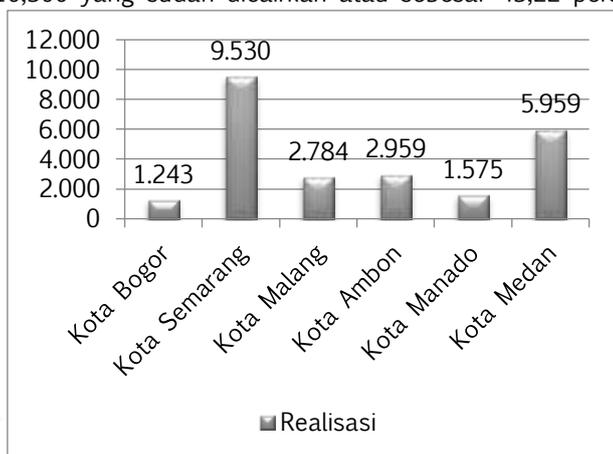


Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015

Gambar 11. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SMP Berdasarkan Kota Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Kota Bogor, jumlah sasaran penerima KIP sebanyak 14,066, yang direalisasikan sebanyak 8,584 penerima KIP dan sebanyak 4,467 yang sudah dicairkan atau sebesar 52,04 persen dari jumlah penerima. Kota Semarang sendiri dari 13,853 penerima KIP, lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 10,705, dan sebanyak 4,390 yang sudah dicairkan atau sebesar 31,69 persen dari jumlah penerima. Begitu juga untuk Kota Malang dari 14,366 penerima KIP, jauh lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 6,854, dan sebanyak 1,302 yang sudah dicairkan atau sebesar 9,06 persen dari jumlah penerima.

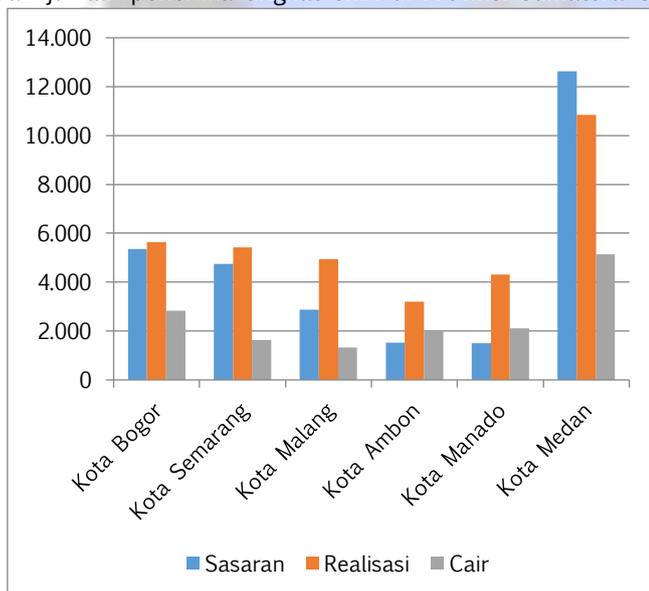
Sementara itu, untuk Kota Ambon dari 5,850 penerima KIP, lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 4,072, dan sebanyak 1,591 yang sudah dicairkan atau sebesar 27,20 persen dari jumlah penerima. Dan untuk Kota Manado dari 5,006 penerima KIP, lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 4,412 dan sebanyak 2,048 yang sudah dicairkan atau sebesar 40,91 persen dari jumlah penerima. Sedangkan untuk Kota Medan jumlah sasaran penerima KIP sebanyak 37,607 yang direalisasikan sebanyak 23,830 penerima KIP dan sebanyak 10,300 yang sudah dicairkan atau sebesar 43,22 persen dari jumlah penerima.



Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 12. Perkembangan Jumlah Penerima KIP Jenjang SMA Berdasarkan Kota Kajian

Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Kota Bogor jumlah penerima KIP sebanyak 1,243 atau sebesar 0,19 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Jawa Barat dan 0,12 persen secara nasional. Untuk Kota Semarang jumlah penerima KIP sebanyak 9,530 atau sebesar 1,68 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Jawa Tengah dan 0,95 persen secara nasional. Sementara itu, untuk Kota Malang jumlah penerima KIP sebanyak 2,784 atau sebesar 0,42 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Jawa Timur dan 0,28 persen secara nasional.

Begitu juga untuk Kota Ambon jumlah penerima KIP sebanyak 2,959 atau sebesar 5,85 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Maluku dan 0,29 persen secara nasional. Dan untuk Kota Manado jumlah penerima KIP sebanyak 1,575 atau sebesar 3,06 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Sulawesi Utara dan 0,16 persen secara nasional. Sedangkan untuk Kota Medan jumlah penerima KIP sebanyak 5,959 atau sebesar 1,96 persen dari jumlah penerima tingkat SMA di Provinsi Sumatera Utara dan 0,59 persen secara nasional.



Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa untuk Kota Bogor, dari 5,634 penerima KIP, lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 5,362, dan sebanyak 2,833 yang sudah dicairkan atau sebesar 50,28 persen dari jumlah penerima. Kota Semarang sendiri dari 5,417 penerima KIP, lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 4,737, dan sebanyak 1,637 yang sudah dicairkan atau sebesar 30,22 persen dari jumlah penerima. Begitu juga untuk Kota Malang dari 4,935 penerima KIP, jauh lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak

Sumber: Data Berbasis Online Per 19 Desember 2015
Gambar 13 Perkembangan Jumlah Penerima KIP
Jenjang SMK Berdasarkan Kota Kajian

2,883, dan sebanyak 1,327 yang sudah dicairkan atau sebesar 26,89 persen dari jumlah penerima.

Sementara itu, untuk Kota Ambon dari 3,201 penerima KIP, jauh lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 1,522, dan sebanyak 2,016 yang sudah dicairkan atau sebesar 62,98 persen dari jumlah penerima. Dan untuk Kota Manado dari 4,319 penerima KIP, jauh lebih banyak dari jumlah sasaran penerima sebanyak 1,492 dan sebanyak 2,107 yang sudah dicairkan atau sebesar 48,78 persen dari jumlah penerima.

Sedangkan untuk Kota Medan jumlah sasaran penerima KIP sebanyak 12,620 yang direalisasikan sebanyak 10,835 penerima KIP dan sebanyak 5,143 yang sudah dicairkan atau sebesar 47,47 persen dari jumlah penerima. Berdasarkan paparan di atas bahwa secara keseluruhan untuk tingkat kota penyaluran dan pencairan dana pendidikan melalui pemberian KIP sudah cukup baik. Namun perlu upaya yang lebih keras lagi dari semua pihak untuk mengoptimalkan penyaluran dana bantuan ke penerima. Salah satunya pada tingkat SMA yang dirasakan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berkaitan dengan proses penyaluran dana bantuan pendidikan melalui pemberian KIP dirasakan tidak tepat waktu. Diharapkan waktu ideal untuk penyaluran dana bantuan pendidikan setiap semester atau awal pembelajaran. Sehingga dana yang diterima bisa digunakan untuk keperluan sekolah. Sedangkan untuk jumlah dana yang disalurkan sudah sesuai dengan jumlah siswa penerima bantuan pendidikan.

Direktorat teknis perlu mempertegas bahwa proses pencairan dana PIP dilakukan dimasa yang akan datang dilakukan tepat waktu untuk menghindari rendahnya serapan anggaran. Sebagai contoh kasus ditemukan data dari Indonesia Timur bahwa anak penerima bantuan PIP telah lulus sekolah namun bantuan yang diharapkan belum tersalurkan. Dengan contoh kasus seperti ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mempercepat proses pencairan dan mengurangi proses birokrasi administrasi di lapangan.

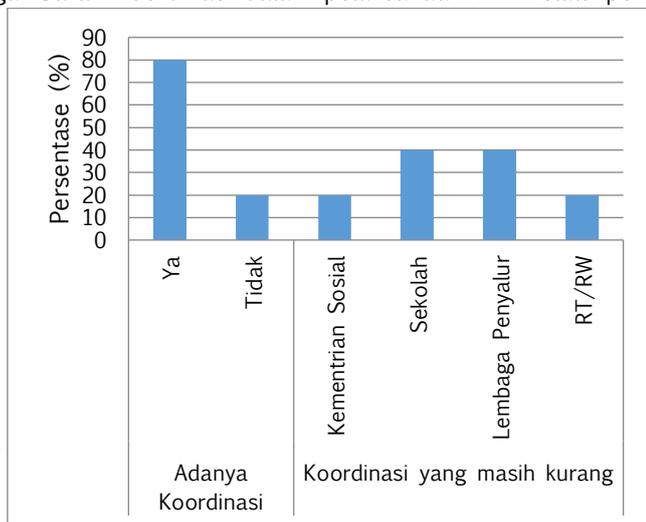
Kendala lain yang dihadapi adalah adanya penerapan yang dilakukan dilapangan dengan mencairkan dana bantuan secara kolektif dengan alasan efisiensi dan efektifitas pekerjaan pelaksana program dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada pengelola dengan biaya-biaya tambahan yang telah disepakati sebagai uang administrasi pengelola. Langkah yang ditempuh oleh pengelola tersebut cukup beralasan karena untuk membantu dan mempermudah dalam proses penyaluran dana bantuan PIP seperti untuk penerima yang berada di daerah terpencil/kepulauan utk pencairannya siswa harus mengeluarkan biaya tambahan sendiri ke daerah daratan/kabupaten dengan biaya yang sangat mahal sehingga nominal yang didapatkan habis untuk biaya transport pencairan.

Langkah yang ditempuh oleh lembaga penyalur adalah dengan mengembangkan program pencairan keliling melalui pelayanan khusus. Langkah ini ditempuh untuk meminimalisir biaya akomodasi dari peserta didik lebih khusus yang berada di daerah terisolir dan 3T. Selain itu juga lembaga penyalur memberikan layanan khusus diluar jam dinas pada umumnya misalkan setiap hari Sabtu dan Minggu selama periode pencairan, yang tentu layanannya berbeda dengan layanan pelanggan secara umum.

Penyaluran dana PIP melalui pemberian KIP diterima langsung oleh siswa dan jumlah penerima dana bantuan KIP sesuai dengan jumlah siswa miskin yang ada di sekolah. Untuk lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP perlu diperhatikan mengenai pendataan awal penerima KIP. Pendataan diharapkan dikelompokkan per lembaga (sekolah). Contoh kasus: penerima KIP tahap I sejumlah 10.267 siswa. SMPN 19 Malang menemukan 42 siswa dari SMPN 19 Malang sebagai calon penerima. Yang dikhawatirkan ada siswa yang belum ditemukan sehingga terjadi kesalahpahaman dengan orang tua/wali siswa.

Mekanisme Koordinasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi, pendataan penerima bantuan KIP, dan penyaluran dana pendidikan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan berbagai pihak. Namun dalam pelaksanaannya, masih ada jalur koordinasi yang dirasakan masih kurang. Adapun gambaran koordinasi dalam pelaksanaan PIP melalui pemberian PIP sebagai berikut:



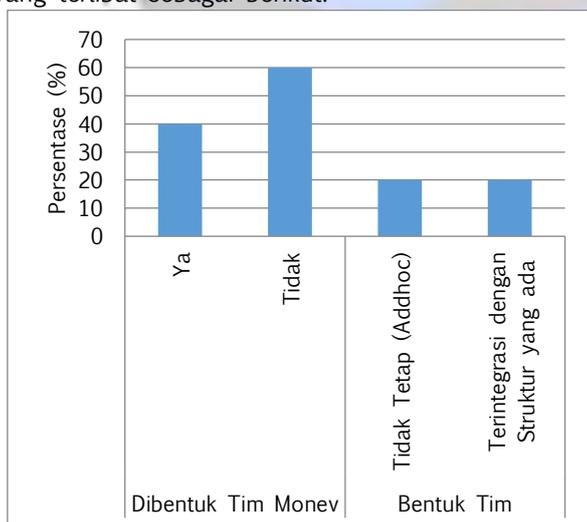
Sumber: Hasil Data Kajian, 2015

Gambar 14. Gambaran Koordinasi dalam Pelaksanaan PIP melalui Pemberian KIP

Berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, secara empiris dinyatakan bahwa dalam 80 persen sudah dilakukan koordinasi, namun ada beberapa jalur koordinasi yang dirasakan masih kurang yaitu dengan pihak sekolah dan lembaga penyalur. Salah satu factor penyebab kurangnya koordinasi dengan sekolah dan lembaga penyalur adalah kurangnya sumber daya manusia. Untuk itu, berkaitan dengan optimalisasi jalur koordinasi dan sosialisasi, maka perlu diperhatikan tenaga-tenaga lapangan.

Monitoring

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP, Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi yang ditugaskan kepada tim yang bersifat tidak tetap (*Addhoc*). Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PIP melalui pemberian KIP melibatkan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan, adanya pemberian KIP dapat meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peningkatan APS, APM dan Prestasi Akademik Siswa. Adapun gambaran umum bentuk tim dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta unsur yang terlibat sebagai berikut:



Berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, secara empiris dinyatakan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP, 40 persen Dinas Pendidikan membentuk tim monitoring dan evaluasi, dengan tim yang bersifat tidak tetap (*Addhoc*) 20 persen, dan terintegrasi dengan Struktur yang ada 20 persen. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PIP melalui pemberian KIP yang melibatkan Dinas Pendidikan (40 persen), Sekolah (20 persen), dan Sekolah (20 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus terkait kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

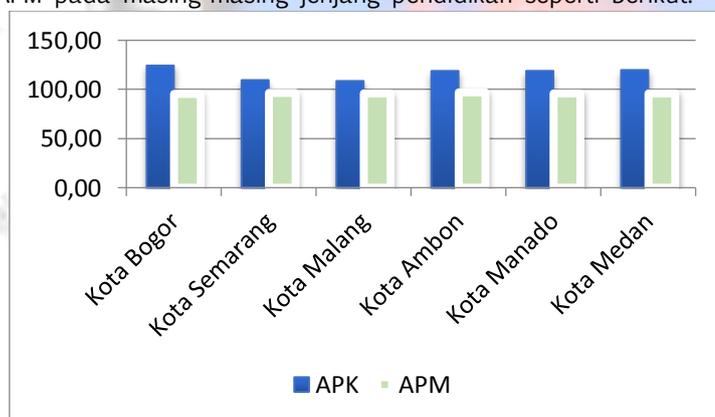
Sumber: Hasil Data Kajian, 2015
Gambar 15 Gambaran Umum tentang Bentuk Tim
Monitoring dan Evaluasi

PIP melalui pemberian KIP, agar pemberian KIP tepat sasaran dan dana bantuan pendidikan dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat.

Manfaat dan Dampak Program Indonesia Pintar

Pemerintah dengan program Indonesia pintar melalui pemberian KIP ingin menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah, mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah, membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran, mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun (9) dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun), dan lebih jauh lagi untuk peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan data lapangan kajian PIP melalui pemberian KIP menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat dan itu juga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

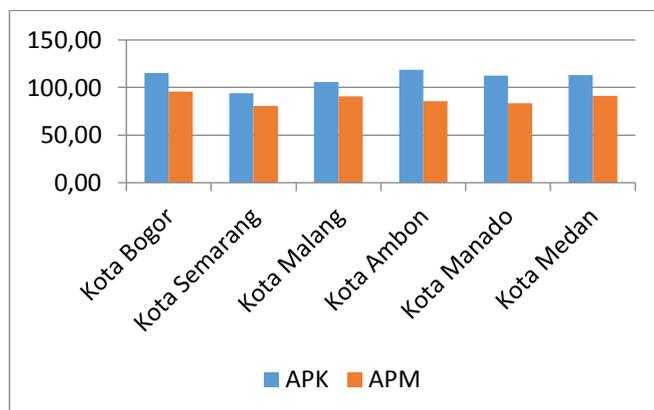
Berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, secara empiris dinyatakan bahwa dengan Program Indonesia Pintar melalui pemberian KIP memberikan dampak positif dalam peningkatan partisipasi sekolah dan mutu pendidikan. Indikator lain melalui telah perolehan nilai APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidikan seperti berikut.



Sumber: Data PDSPK tahun 2014-2015
Gambar 16 APK dan APM di Kota Kajian pada SD

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut: 1) APK di Kota Bogor sebesar 124,26 persen dengan APM sebesar 95,50 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 24,26 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 95,50 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 2) APK di Kota Semarang sebesar 109,51 persen dengan APM sebesar 96,36 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 9,51 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,36 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 3) APK di Kota Malang sebesar 108,59 persen dengan APM sebesar 96,06 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 8,59 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,06 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 4) APK di Kota Ambon sebesar 118,82 persen dengan APM sebesar 97,09 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 18,82 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 97,09 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 5) APK di Kota Manado sebesar 118,90 persen dengan APM sebesar 95,95 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 18,90 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 95,95 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD., dan 6) APK di Kota Medan sebesar 119,77 persen dengan APM sebesar 96,05 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 19,77 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,05 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD.

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut: 1) APK di Kota Bogor sebesar 124,26 persen dengan APM sebesar 95,50 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 24,26 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 95,50 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 2) APK di Kota Semarang sebesar 109,51 persen dengan APM sebesar 96,36 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 9,51 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,36 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 3) APK di Kota Malang sebesar 108,59 persen dengan APM sebesar 96,06 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 8,59 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,06 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 4) APK di Kota Ambon sebesar 118,82 persen dengan APM sebesar 97,09 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 18,82 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 97,09 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD. 5) APK di Kota Manado sebesar 118,90 persen dengan APM sebesar 95,95 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 18,90 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 95,95 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD., dan 6) APK di Kota Medan sebesar 119,77 persen dengan APM sebesar 96,05 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 19,77 persen siswa yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah di SD dan 96,05 persen anak usia 7-12 tahun bersekolah di SD.



Sumber: Data PDSPK tahun 2014-2015
 Gambar 17 APK dan APM di Kota Kajian pada SMP

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut: 1) APK di Kota Bogor sebesar 115,46 persen dengan APM sebesar 95,85 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 15,46 persen siswa yang tidak berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan 95,85 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP. 2) APK di Kota Semarang sebesar 94,01 persen dengan APM sebesar 80,62 persen.

Hal ini berarti bahwa terdapat 5,99 persen siswa yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah di SMP dan 80,62 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP. 3) APK di Kota Malang sebesar 106,10 persen dengan APM sebesar 90,90 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 6,10 persen siswa yang tidak berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan 90,90 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP. 4) APK di Kota Ambon sebesar 118,90 persen dengan APM sebesar 85,91 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 18,90 persen siswa yang tidak berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan 85,91 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP. 5) APK di Kota Manado sebesar 112,84 persen dengan APM sebesar 83,69 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 12,84 persen siswa yang tidak berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan 83,69 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP., dan 6) APK di Kota Medan sebesar 113,13 persen dengan APM sebesar 91,42 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 13,13 persen siswa yang tidak berusia 13-15 tahun bersekolah di SMP. dan 91,42 persen anak usia 13-15 tahun bersekolah di SMP.



Sumber: Data PDSPK tahun 2014-2015
 Gambar 18 APK dan APM di Kota Kajian pada SMA/SMK

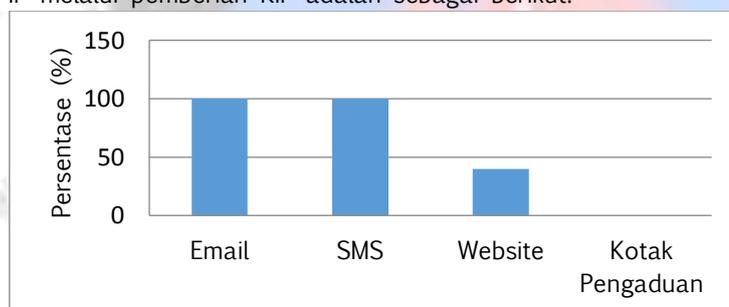
Gambaran data di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut: 1) APK di Kota Bogor sebesar 99,35 persen dengan APM sebesar 73,06 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 0,65 persen siswa yang berusia 16-18 tahun tidak bersekolah di SMA/SMK dan 73,06 persen anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK. 2) APK di Kota Semarang sebesar 100,45 persen dengan APM sebesar 78,58 persen.

Hal ini berarti bahwa terdapat 0,45 persen siswa yang tidak berusia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK dan 78,58 persen anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK. 3) APK di Kota Malang sebesar 112,04 persen dengan APM sebesar 84,70 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 12,04 persen siswa yang tidak berusia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK dan 84,70 persen anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK. 4) APK di Kota Ambon sebesar 88,23 persen dengan APM sebesar 67,94 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 11,77 persen siswa yang berusia 16-18 tahun tidak bersekolah di SMA/SMK dan 88,23 persen anak

usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK 5) APK di Kota Manado sebesar 107,12 persen dengan APM sebesar 75,57 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 7,12 persen siswa yang tidak berusia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK dan 75,57 persen anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK., dan 6) APK di Kota Medan sebesar 101,13 persen dengan APM sebesar 77,70 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 1,13 persen siswa yang tidak berusia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK dan 77,70 persen anak usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/SMK.

Pengaduan dan Tindak Lanjut.

Suatu program tidak dapat disebut berjalan baik tanpa adanya bahan evaluasi. Instrumen evaluasi yang diterapkan berupa pemberian layanan dan bantuan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan program di lapangan. Dari tingkat kementerian untuk mengakomodir setiap pengaduan masyarakat disediakan layanan pengaduan yang berbasis online dan sms di <http://pengaduanpip.kemdikbud.go.id/>. Untuk mengkoordinir berbagai keluhan dan masukan masyarakat terkait pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP, Dinas Pendidikan membuka layanan pengaduan melalui pesan singkat (SMS), email, dan website. Dan komponen yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah pada proses pendataan dan penyaluran dana bantuan pendidikannya. Pengaduan-pengaduan tersebut berasal dari sekolah, siswa, orang tua siswa dan lembaga penyalur. Adapun hasil pengumpulan data tentang pengaduan terkait PIP melalui pemberian KIP adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas bahwa layanan pengaduan yang sering digunakan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan adalah melalui pesan singkat (SMS) (100 persen), email (100 persen), dan website (40 persen).

Sumber: Hasil Analisa Data Kajian, 2015.

Gambar 19 Pusat Layanan Pengaduan yang disediakan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di atas, secara empiris dinyatakan bahwa terkait komponen aduan yang diterima oleh Dinas Pendidikan, masalah penyaluran dana (100 persen) dan pendataan (40 persen) harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Besaran di atas menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar perlu ditingkatkan lagi guna menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP, ada beberapa kendala yang dihadapi. Namun secara umum, kendala yang dihadapi yakni: ada beberapa siswa yang tidak bisa mencairkan dana karena nama siswa tidak sama dengan yang terdaftar di buku tabungan, ID rekening semestinya 18 digit, namun yang ada di SK 17 digit. Harapannya, untuk perbaikan dan pengoptimalan pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP adalah agar dilakukan sinkronisasi dengan lembaga penyalur sehingga data penerima dana bantuan diinformasikan ke pihak Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

SIMPULAN

Beberapa hasil temuan dari kajian Peningkatan Kinerja Program Pemberian Kartu Indonesia Pintar antara lain:

1. Sosialisasi Program Indonesia Pintar melalui pemberian kartu Indonesia pintar telah dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan berjenjang. Namun belum optimal menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar dan terpencil (Daerah 3T).
2. Pendataan peserta penerima bantuan Program Indonesia Pintar telah terintegrasi dengan sistem layanan DAPODIK Kemdikbud, Kemensos, BPS, Bappeda, PDSP, dan TNP2K dan perangkat desa walaupun masih terdapat kabupaten/kota yang sulit mengakses dan menggunakan informasi tentang pendataan program Indonesia Pintar seperti daerah di Kepulauan di provinsi Maluku yang sulit diakses melalui perjalanan darat.
3. Penyaluran dana PIP setiap tahun mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan antara lain; karena adanya perubahan regulasi anggaran, perubahan struktur kepemimpinan baik ditingkat satuan pendidikan, sampai pada level pemerintah daerah, yang mengakibatkan adanya perubahan pejabat yang mengeksekusi bantuan PIP. Keterlambatan penyaluran dana PIP berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan pencapaian jumlah realisasi bantuan sasaran program rata-rata berada pada angka capaian dibawah 12 persen berdasarkan provinsi kajian.
4. Koordinasi pelaksanaan PIP oleh dinas pendidikan masih kurang optimal dengan jajaran kementerian sosial, sekolah, lembaga penyalur, RT/RW yang disebabkan karena tenaga atau SDM yang melakukan sosialisasi cukup terbatas.
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP secara intensif telah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pemantauan langsung oleh tim monitoring yang telah dibentuk melalui satuan kerja terkait.
6. Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar cukup bermanfaat dan berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa hal ini dapat dilihat pada capaian Angka Partisipasi Sekolah maupun Indeks Pembangunan manusia Indonesia setiap tahun terus meningkat.
7. Untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, pengelola Program Indonesia Pintar secara aktif memberikan layanan yang cepat, dan terpercaya, termasuk pengaduan melalui email dan SMS. Materi pengaduan yang memiliki proporsi tertinggi adalah tentang proses penyaluran anggaran bantuan yang mencapai 100 persen.

Berdasarkan hasil penelitian, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi program PIP melalui pemberian KIP perlu dilakukan dengan cepat dan tepat dengan mengintensifkan peran aktif stakeholder, baik eksekutif di daerah, legislatif, dan masyarakat umumnya sehingga memiliki konsep dan pemahaman yang sama terhadap program Indonesia Pintar melalui pemberian kartu Indonesia Pintar. Metode sosialisasi yang perlu dilakukan supaya setiap informasi PIP langsung diterima oleh masyarakat luas adalah dengan membentuk jaringan komunikasi yang dikoordinir oleh satuan kerja terkait, materi sosialisasi PIP dapat disebarakan melalui SMS, Whatsapp, serta media sosialisasi lainnya.
2. Untuk mendapatkan data yang valid dan terintegrasi dengan sistem DAPODIK Kemdikbud sampai dipelosok negeri, pemerintah perlu melengkapi sarana prasarana akses informasi dan komunikasi yang berbasis satelit pada masing-masing tingkat kecamatan (UPTD) dengan memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental operator masing-masing daerah dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan secara intensif dan langsung di masing-masing daerah dengan menggunakan alokasi dana APBN.
3. Untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluran dana PIP, diharapkan kepada pemerintah untuk menyiapkan dana talangan/cadangan khusus PIP yang diatur dalam regulasi pemerintah yang kuat, kemudian dalam penyalurannya ke daerah perlu koordinasi dengan bank yang ada di daerah seperti Bank Papua, Bank Maluku, karena tidak semua daerah

terpencil memiliki bank BRI yang direkomendasikan oleh pemerintah sebagai lembaga penyalur dana PIP.

4. Jadwal penyaluran dana PIP agar dapat disesuaikan dengan waktu kebutuhan rumah tangga akan pembiayaan sekolah seperti menjelang tahun akademik baru. Penyempurnaan waktu penyaluran dana PIP ini diharapkan dapat mengurangi beban rumah tangga terhadap pengeluaran pendidikan.
5. Untuk mengintensifkan koordinasi antara pemerintah pusat ke daerah, perlu adanya pemahaman yang sama tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah daerah melalui kegiatan bersama muspida daerah dalam bentuk rapat koordinasi, seminar sosialisasi, dan upaya penguatan pemahaman lainnya. Dalam konteks pelaksanaan PIP melalui pemberian KIP diharapkan pemerintah daerah untuk setiap saat memberikan laporan setiap perkembangan yang ada di daerah karena mekanisme pemberian bantuan untuk tahun 2016 semua berbasis pada data DAPODIK Kemdikbud.
6. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PIP diharapkan dapat dilaksanakan pada awal tahun dan di akhir tahun. Tujuan dilaksanakan pada awal tahun adalah untuk mengidentifikasi secara langsung perencanaan serta kebutuhan dalam pengembangan program, sedangkan monitoring dan evaluasi diakhir tahun bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program PIP yang telah dikembangkan. Perlu direncanakan proses monitoring dan evaluasi secara online khusus untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau baik transportasi dan informasi.
7. Secara umum PIP sangat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi yang perlu dilakukan oleh pemerintah perlu memperluas jangkauan sasaran PIP bukan hanya terbatas pada masyarakat miskin namun sasaran PIP perlu menysasar masyarakat yang rentang miskin.
8. Banyaknya pengaduan kepada pengelola PIP di tingkat pusat memberikan informasi yang cukup baik pada pelaksanaan PIP dimasa yang akan datang, namun yang perlu dilakukan oleh pengelola adalah bagaimana meningkatkan layanan secara prima baik dari sisi input, proses, maupun outputnya sehingga sasaran program tercapai. Disisi psikologis perlu adanya komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas mutu pendidikan sehingga setiap program yang dikembangkan bukan berbasis projek/kasus semata namun harapan besar kita bersama adalah terciptanya Indonesia Cerdas dan Mandiri dari Sabang sampai Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Frederic Harbison dan Charles A. Myers. 1965. *Manpower and Education: Country Studies in Economic Development*. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- HAR Tilaar. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta. Rineka cipta.
- Haynes. Robert N., 1986. *Managing Performance: A Comprehensive Guide to Effective Supervision*. California. Lifetime Learning Publications.
- Ivancevich, Jhon M., Robert Konopaske dan Micahel T. Matteson. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Edisi Ketujuh Jilid 2, alih bahasa Dharma Yuwono. Jakarta. Erlangga.
- Jacques Delors et.al. 1961. *Learning: The Treasure Within. The Report to UNESCO of International Commission for The Twenty-First Century*. Paris: UNESCO.
- James, Gibson I, John M. Ivancevich dan James H. Donnely. 1985. *Organizations*. Texas: Business Publication, Inc.
- John Dewey. 1961. *Democracy and Education*. New York. The Macmillan Company.
- Kotler, Philip. Somkid Jatusripitak dan Suvit Maesincee. 1997. *The Marketing of Nations: A Strategic Approach to Building National Wealth*. New York: The Free Press.

- Mathis., Robert L, John H. Jackson. 2006. *Human Resource Management*, alih bahasa Diana Angelica. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles., Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Mohrman, . Aban M. M. Resnick West, dan Edward E. Lawler. 1989. *Designing Performance Appraisal Systems*. San Francisco. Jossey Bass.
- Omi Intan Naomi. 2002. *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Patton., Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*, terjemahan Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peter Jarvis. 2002. *The Age of Learning Education and The Knowledge Society*. London. Kogan Page Limited.
- Psacharopoulos, George and Maureen Woodhall. 1985. *Education for Development, An Analysis of Investment Choices*. USA: A World Bank Publication.
- Robbin, Stephen P. 1997. *Essentials of Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc.,
- Robert P. Vecchio. 1985. *Organizational Behavior*. USA : Harcourt Brace and Company.
- Ronald Inglehart. 1997. *Modernization and Postmodernization: Cultural Economic and Political Change in 43 Societies*. New Jersey. Princeton University Press.
- S. Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung. Tarsito.
- Soedijarto. 2010. Pendidikan Nasional dan Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa (Jatidiri Bangsa) dan Implikasinya Terhadap Sistem Kurikulum dan Proses Pembelajaran. *Makalah*. Disajikan dalam “Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, Depdiknas, 14 Januari 2010.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tempo.com.<http://apbnnews.com/artikel-opini/anggaran-pendidikan-apbnp-2015/#ixzz3s2rPHBon>
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan.2009. *Evaluasi Kinerja SDM, Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.